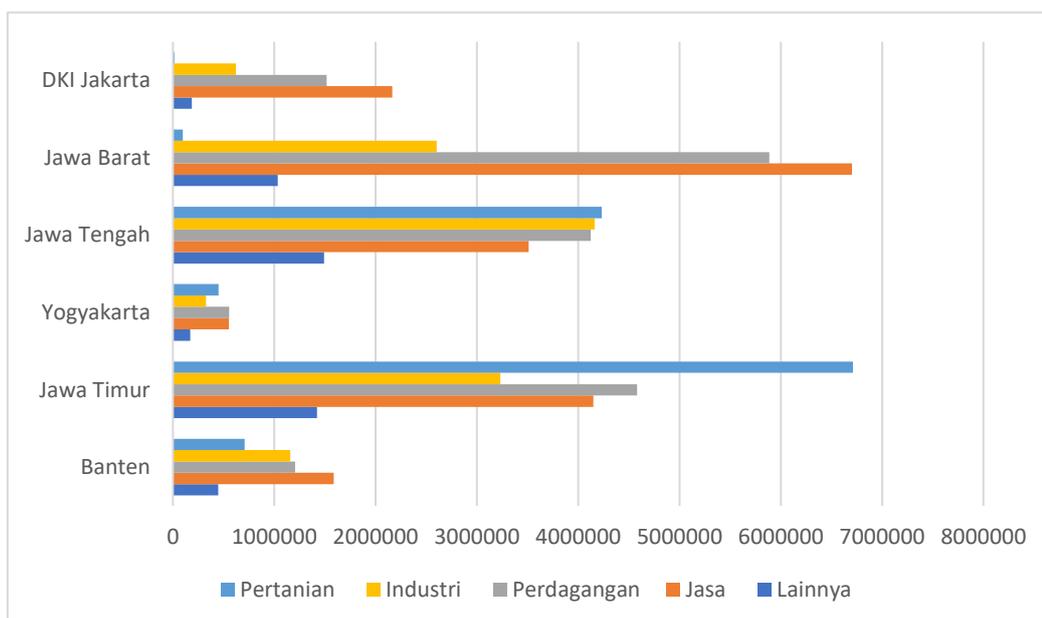


## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Perkembangan Tenaga Kerja yang bekerja di Pulau Jawa

Bidang ketenaga kerjaan merupakan salah hal yang penting dalam usaha memajukan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja dapat terjadi di setiap sektor usaha yang ada, namun setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda di setiap daerah dalam penyerapan tenaga kerjanya. Berikut adalah gambar yang menunjukkan Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan Utama di Tahun 2017



Sumber: data diolah

**GAMBAR 4.1**  
Jumlah Penduduk yang Bekerja  
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017

Pada tahun tahun 2017 sektor pertanian di Jawa Timur penyumbang terbesar penyerap tenaga kerja sebesar 6713893 orang, ke dua sektor jasa di

Jawa Barat menyerap tenaga kerja sebesar 6703603 orang, ke tiga sektor perdagangan di Jawa Barat menyerap tenaga kerja sebesar 5886243 orang, ke empat sektor industri di Jawa Tengah menyerap 4163686 orang dan terakhir sektor lainnya di Jawa Timur menyerap tenaga kerja sebesar 1493314 orang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa memiliki 3 sektor unggulan yang banyak menyerap tenaga kerja, ada sektor pertanian yang terletak di Jawa timur, sektor jasa dan perdagangan yang terletak di Jawa Barat.

## B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

**TABEL 4.1**  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
di Setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018  
(Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	1454563,9	1540078,2	1635855,8	1736788
Jawa Barat	1207232,3	1275527,6	1342953,4	1418695,9
Jawa Tengah	806765,09	849313,2	894050,47	941613,95
Yogyakarta	83474,45	87688,2	92300,66	98023,29
Jawa Timur	1331376,1	1405561	1482147,6	1699578,3
Banten	368377,2	387824,4	409959,7	432876,43

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan provinsi menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menghasilkan PDRB terbesar secara relatif, sedangkan provinsi Yogyakarta merupakan Provinsi dengan nilai PDRB terkeci. Pada tahun 2018

Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PDRB terbesar di Pulau Jawa sebesar Rp.1736788,04 milyar, kedua PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.1699578,29 milyar, ke tiga PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.1418695,94 milyar, ke empat PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.941613,95 milyar, ke lima PDRB Provinsi Banten sebesar Rp.432876,43 milyar, dan terakhir PDRB Provinsi Yogyakarta sebesar Rp.98023,29 milyar. Alasan DKI Jakarta memiliki PDRB tertinggi karena pengeluaran untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah DKI Jakarta lebih besar di banding Provinsi lain, harga barang di DKI Jakarta tergolong mahal otomatis pengeluaran untuk konsumsi juga pasti besar beda dengan daerah lain contohnya Yogyakarta harga barang yang relative lebih murah.

### **C. Perkembangan Investasi di Pulau Jawa**

Investasi merupakan pengorbanan materi atau non materi di masa sekarang untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Pelaku investasi di kelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah, perusahaan (perusahaan yang difasilitasi dan tidak difasilitasi), dan rumah tangga. Data dari investasi perusahaan yang ada dapat dipakai untuk perencanaan dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang difasilitasi dan dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (Badan Pusat Statistik, 2018).

**TABEL 4.2**  
**Realisasi Investasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2018**  
**(Milyar Rupiah)**

Provinsi	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek
	2017	2017	2018	2018
DKI Jakarta	47262300	659	49097420	666
Jawa Barat	38390600	1491	42278210	1661
Jawa Tengah	19866000	1403	27474890	1478
Yogyakarta	294600	92	613171	148
Jawa Timur	45044500	1211	33333130	1679
Banten	15141900	699	18637560	718

Sumber: BKPM 2019

Dari tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan realisasi investasi pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.49097420 dengan jumlah proyek sebanyak 666 yang terealisasi, Provinsi Jawa sebesar Rp. 42278210 dan 1661 proyek yang terealisasi, Jawa Tengah sebesar Rp.27474890 dan 1478 proyek yang teralisasi, Yogyakarta sebesar Rp.613171 dan 148 proyek yang terealisasi, Jawa Timur sebesar Rp.33333130 dan 1679 proyek yang terealisasi dan Provinsi Banten sebesar Rp.18637560 dan 718. Pada tahun 2018 ini jumlah proyek paling banyak teralisasi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1679 dan proyek yang paling sedikit di Provinsi Yogyakarta sebanyak 148 proyek. Alasan DKI Jakarta menjadi tempat investasi terbesar di Pulau Jawa karena DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dan menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian banyak pelaku usaha berinvestasi di sana. Yogyakarta menjadi tempat investasi paling kecil di Pulau Jawa berkaitan dengan peraturan pemerintah di Yogyakarta tidak membebaskan pabrik industri besar, dan hotel, investasi di Yogyakarta lebih di arahkan ke bidang Pendidikan dan pariwisata.

#### D. Perkembangan Upah di Pulau Jawa

Upah berfungsi sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas usahanya selama bekerja di suatu perusahaan, perusahaan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitas yang diberikan kepada pengusaha. Kenaikan upah dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui kesempatan peningkatan konsumsi, tetapi dalam beberapa kondisi kenaikan upah memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

**TABEL 4.3**  
KHL dan UMK di Setiap Provinsi Pulau Jawa  
Tahun 2014-2015

Provinsi	2014		2015	
	KHL	UMP	KHL	UMP
DKI Jakarta	2299860	2441000	2538174	2700000
Jawa Barat	946689	1000000	946689	1000000
Jawa Tengah	857728	910000	857728	910000
Yogyakarta	924284	988500	924284	988500
Jawa Timur	825000	1000000	825000	1000000
Banten	1325000	1170000	1403556	1325000

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari tabel rata-rata KHL maupun UMP di setiap provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami kenaikan setiap tahunnya, penetapan upah tersebut di setiap daerahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kehidupan minimumnya karena setiap daerah memiliki tingkat kebutuhan hidup minimum yang berbeda. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk menjaga daya beli penduduk akibat adanya kenaikan harga atau inflasi. Penentuan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi dan serikat pekerja melalui survei kebutuhan hidup minimum yang dilakukan setiap tahun. Provinsi Banten memiliki Upah yang lebih kecil dibanding dengan KHL artinya

Upah di Provinsi Banten masih kurang di bawah KHL dibanding dengan Provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa yang upahnya sudah di atas KHL yang berarti telah bisa memenuhi standar hidup layak di Provinsi tersebut.